



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AHMAD ROFI'UDDIN
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 92758

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 5.217.000.000**

1. Tanah Seluas 30000 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 9770 m2 di JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/120 m2 di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/300 m2 di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
5. Tanah Seluas 830 m2 di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 249.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 329 m2/329 m2 di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.543.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m2/200 m2 di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 83.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 7.000.000****D. SURAT BERTAHAP****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 2.316.516.315**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.624.016.315
III. HUTANG	Rp.	550.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.074.016.315

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.